BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, pemerataan hasil pembangunan, perluasan kesempatan kerja, serta pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu, pengangguran merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi karena berkaitan langsung dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, produktivitas tenaga kerja, dan stabilitas sosial ekonomi. Menurut Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, pembangunan ekonomi merupakan proses multidimensional yang melibatkan perubahan struktur ekonomi, peningkatan taraf hidup masyarakat, pengurangan ketimpangan, serta perluasan kesempatan kerja.[1]

Permasalahan pengangguran hingga saat ini masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Meskipun berbagai indikator makroekonomi menunjukkan adanya pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19, peningkatan aktivitas ekonomi tersebut belum sepenuhnya mampu mengurangi jumlah pengangguran secara merata.Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kesempatan kerja yang sebanding dengan pertumbuhan jumlah angkatan kerja.

Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah karena tingginya pengangguran dapat menimbulkan berbagai dampak ekonomi maupun sosial, seperti meningkatnya angka kemiskinan, menurunnya produktivitas tenaga kerja, berkurangnya pendapatan masyarakat, serta meningkatnya beban pemerintah dalam penyediaan program perlindungan sosial. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator utama yang mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menyerap angkatan kerja. Tingginya tingkat pengangguran

[1]Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Economic Development*, 12th ed. (Boston: Pearson Education, 2015), 15–17.

tidak hanya menunjukkan belum optimalnya penciptaan lapangan kerja, tetapi juga berdampak terhadap menurunnya pendapatan masyarakat, meningkatnya kemiskinan, kesenjangan sosial, serta berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, penurunan TPT menjadi salah satu sasaran penting dalam kebijakan pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Untuk menggambarkan kondisi tersebut, perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia dan Provinsi Jawa Barat selama periode 2021–2025 perlu diperhatikan sebagai indikator awal yang menunjukkan dinamika pasar tenaga kerja selama masa pemulihan ekonomi pascapandemi.

Tabel 1. 1
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021–2025

No.	Tahun	Indonesia (%)	Jawa Barat (%)
1.	2021	6,49	9,82
2.	2022	5,86	8,31
3.	2023	5,32	7,44
4.	2024	4,91	6,75
5.	2025	4,85	6,66

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia dan Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat, 2021–2025.

Berdasarkan Tabel 1.1, Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia menunjukkan kecenderungan menurun selama periode 2021–2025 seiring dengan membaiknya aktivitas ekonomi nasional setelah pandemi Covid-19. Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa proses pemulihan ekonomi secara nasional telah mendorong peningkatan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja pada berbagai sektor ekonomi. Meskipun demikian, kondisi tersebut belum sepenuhnya terjadi secara merata di seluruh provinsi, termasuk Provinsi Jawa Barat yang masih menghadapi tantangan cukup besar dalam menurunkan tingkat pengangguran.

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia sekaligus menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat mencapai lebih dari 48 juta jiwa, dengan proporsi penduduk usia

produktif yang sangat besar. Kondisi tersebut menjadi potensi penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Namun demikian, besarnya jumlah penduduk usia kerja juga menyebabkan persaingan memperoleh pekerjaan menjadi semakin tinggi apabila pertumbuhan kesempatan kerja tidak mampu mengimbangi peningkatan jumlah angkatan kerja. Oleh karena itu, persoalan pengangguran di Provinsi Jawa Barat menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan daerah.

Selain memiliki jumlah penduduk terbesar, Provinsi Jawa Barat juga merupakan salah satu daerah dengan kontribusi terbesar terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, terutama melalui sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan jasa. Posisi tersebut menjadikan Jawa Barat sebagai salah satu tujuan utama investasi di Indonesia. Secara teoritis, kondisi tersebut seharusnya mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih besar dibandingkan daerah lain. Namun, dalam kenyataannya, Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat masih relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tingginya aktivitas ekonomi belum sepenuhnya diikuti oleh kemampuan daerah dalam menyerap tenaga kerja secara optimal.

Perbedaan kondisi tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat berbagai faktor yang memengaruhi dinamika pasar tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat. Dengan kata lain, peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, maupun aktivitas produksi belum tentu secara langsung mampu menurunkan tingkat pengangguran apabila tidak diikuti dengan penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan karakteristik angkatan kerja yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka, khususnya pada tingkat kabupaten/kota yang memiliki karakteristik pembangunan ekonomi yang berbeda-beda.

Selanjutnya, apabila diamati pada tingkat kabupaten/kota, kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat menunjukkan variasi yang cukup besar selama periode penelitian. Perbedaan tersebut mencerminkan adanya

ketimpangan dalam kemampuan masing-masing daerah dalam menciptakan kesempatan kerja. Beberapa kabupaten/kota berhasil menurunkan tingkat pengangguran secara signifikan, sedangkan daerah lainnya masih menghadapi tingkat pengangguran yang relatif tinggi meskipun aktivitas ekonominya mengalami peningkatan.

Tabel 1. 2
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021–2025

No.	Kabupaten/Kota					
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kabupaten Bandung	8.32	6.98	6.52	6.36	6.68
2.	Kabupaten Bandung Barat	11.65	9.63	8.11	6.7	6.6
3.	Kabupaten Bekasi	10.09	10.31	8.87	8.82	8.78
4.	Kabupaten Bogor	12.22	10.64	8.47	7.34	7.69
5.	Kabupaten Ciamis	5.06	3.75	3.52	3.37	4.08
6.	Kabupaten Cianjur	9.32	8.41	7.71	5.99	6.17
7.	Kabupaten Cirebon	10.38	8.11	7.65	6.74	6.42
8.	Kabupaten Garut	8.68	7.6	7.33	6.96	6.54
9.	Kabupaten Indramayu	8.3	6.49	6.46	6.25	6.47
10.	Kabupaten Karawang	11.83	9.87	8.95	8.04	7.99
11.	Kabupaten Kuningan	11.68	9.81	9.49	7.78	7.59
12.	Kabupaten Majalengka	5.71	4.16	4.12	4.01	3.62
13.	Kabupaten Pangandaran	3.25	1.56	1.52	1.58	1.91
14.	Kabupaten Purwakarta	10.7	8.75	7.72	7.34	7.54
15.	Kabupaten Subang	9.77	7.77	7.65	6.73	6.8
16.	Kabupaten Sukabumi	9.51	7.77	7.32	7.11	7.23
17.	Kabupaten Sumedang	9.18	7.72	6.94	6.16	6.08
18.	Kabupaten Tasikmalaya	6.16	4.17	3.89	3.74	3.69
19.	Kota Bandung	11.46	9.55	8.83	7.4	7.22
20.	Kota Banjar	6.09	5.53	5.43	5.44	5.26
21.	Kota Bekasi	10.88	8.81	7.9	7.82	7.33
22.	Kota Bogor	11.79	10.78	9.39	8.13	7.95
23.	Kota Cimahi	13.07	10.77	10.52	8.97	8.75
24.	Kota Cirebon	10.53	8.42	7.66	6.29	6.41
25.	Kota Depok	9.76	7.82	6.97	6.27	6.52
26.	Kota Sukabumi	10.78	8.83	8.53	8.34	8.19
27.	Kota Tasikmalaya	7.66	6.62	6.55	6.49	6.43

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, diolah (2026).

Berdasarkan Tabel 1.2, Tingkat Pengangguran Terbuka pada 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2021–2025 menunjukkan kecenderungan menurun, namun penurunannya belum terjadi secara merata.

Kabupaten Bogor mengalami penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka dari 12,22% pada tahun 2021 menjadi 7,69% pada tahun 2025. Penurunan juga terjadi di Kabupaten Karawang dari 11,83% menjadi 7,99%, serta Kota Cimahi dari 13,07% menjadi 8,75% pada periode yang sama.

Di sisi lain, Kabupaten Bekasi masih mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,78% pada tahun 2025, sedangkan Kota Sukabumi dan Kota Bogor masing-masing sebesar 8,19% dan 7,95%. Sebaliknya, Kabupaten Pangandaran menjadi daerah dengan tingkat pengangguran terendah, yaitu 1,91% pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan masing-masing daerah dalam menciptakan kesempatan kerja masih berbeda-beda meskipun berada dalam satu provinsi.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan pembangunan ekonomi yang merata. Perbedaan tingkat pengangguran antarwilayah mengindikasikan bahwa terdapat faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi kemampuan setiap daerah dalam menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penyebab masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka di beberapa kabupaten/kota, perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor ekonomi yang diduga memiliki pengaruh terhadap kondisi tersebut.

Salah satu faktor yang banyak dikaji dalam teori ekonomi pembangunan adalah investasi, yang berperan sebagai pendorong utama peningkatan kapasitas produksi dan penciptaan kesempatan kerja. Pembahasan mengenai fenomena investasi sebagai variabel penelitian akan diuraikan pada bagian berikutnya.

Salah satu faktor yang secara teoritis memiliki hubungan erat dengan tingkat pengangguran adalah investasi. Dalam teori ekonomi pembangunan, investasi dipandang sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi karena mampu meningkatkan kapasitas produksi, memperluas kegiatan usaha, mendorong pertumbuhan sektor industri, serta menciptakan kesempatan kerja baru. Meningkatnya investasi, baik yang berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), pada dasarnya akan

meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran. Oleh karena itu, investasi menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah.

Menurut Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, akumulasi modal melalui investasi merupakan prasyarat penting dalam proses pembangunan ekonomi karena investasi mampu meningkatkan produktivitas, memperluas kapasitas produksi, serta menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[2] Dengan demikian, semakin besar investasi yang masuk ke suatu wilayah, semakin besar pula peluang terciptanya kesempatan kerja yang dapat menyerap angkatan kerja secara produktif.

Sebagai salah satu pusat industri nasional, Provinsi Jawa Barat merupakan daerah dengan realisasi investasi yang relatif tinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Keberadaan kawasan industri di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Bogor menjadikan Provinsi Jawa Barat sebagai tujuan utama investasi nasional, baik investasi domestik maupun investasi asing. Kondisi tersebut diharapkan mampu meningkatkan aktivitas produksi, memperluas kesempatan kerja, serta menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka di berbagai kabupaten/kota.

Berdasarkan Tabel 1.3, realisasi investasi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang cenderung meningkat, meskipun besarnya investasi berbeda pada setiap daerah. Kabupaten Bekasi menjadi salah satu daerah dengan nilai investasi tertinggi, meningkat dari sekitar 43,26 pada tahun 2021 menjadi 81,84 pada tahun 2025. Kabupaten Karawang juga mengalami peningkatan dari 26,63 menjadi 70,78, sedangkan Kabupaten Bogor meningkat dari 9,90 menjadi 32,46 pada periode yang sama. Sebaliknya, beberapa daerah seperti Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kota Tasikmalaya masih mencatat nilai investasi yang relatif lebih rendah dibandingkan daerah industri utama. Perbedaan tersebut

[2]Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Economic Development*, 12th ed. (Boston: Pearson Education, 2015), 109–118.

menunjukkan bahwa penyebaran investasi di Provinsi Jawa Barat masih belum merata antarwilayah.

Tabel 1. 3
Perkembangan Realisasi Investasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021–2025

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kabupaten Bandung	2.392	5.741	8.112	8.982	9.523
2.	Kabupaten Bandung Barat	2.818	6.297	7.877	3.898	6.372
3.	Kabupaten Bekasi	43.263	47.029	61.211	71.833	81.840
4.	Kabupaten Bogor	9.896	15.339	15.185	22.907	32.464
5.	Kabupaten Ciamis	0.003	0.031	0.107	0.132	0.132
6.	Kabupaten Cianjur	0.965	1.261	2.015	2.830	3.576
7.	Kabupaten Cirebon	4.860	3.029	3.022	3.116	4.019
8.	Kabupaten Garut	1.290	1.165	1.356	2.393	2.703
9.	Kabupaten Indramayu	1.908	1.800	1.101	1.512	3.356
10.	Kabupaten Karawang	26.632	37.195	45.865	68.547	70.776
11.	Kabupaten Kuningan	0.007	0.209	0.610	0.493	0.253
12.	Kabupaten Majalengka	1.199	2.668	3.148	3.595	3.364
13.	Kabupaten Pangandaran	0.018	0.415	0.428	0.249	0.200
14.	Kabupaten Purwakarta	4.730	8.337	14.883	8.129	12.472
15.	Kabupaten Subang	5.426	3.027	6.113	9.765	18.201
16.	Kabupaten Sukabumi	2.021	8.112	5.862	4.068	4.712
17.	Kabupaten Sumedang	4.249	3.015	3.289	3.796	5.630
18.	Kabupaten Tasikmalaya	0.008	0.211	0.446	0.228	0.547
19.	Kota Bandung	11.446	7.788	8.539	10.790	11.920
20.	Kota Banjar	0.001	0.029	0.096	0.090	0.119
21.	Kota Bekasi	8.167	13.334	12.378	13.708	11.570
22.	Kota Bogor	0.618	1.571	1.934	1.975	3.917
23.	Kota Cimahi	0.405	1.959	1.892	1.002	0.858
24.	Kota Cirebon	0.080	0.791	0.553	0.983	1.853
25.	Kota Depok	3.515	4.015	4.033	5.506	5.531
26.	Kota Sukabumi	0.197	0.070	0.134	0.169	0.254
27.	Kota Tasikmalaya	0.001	0.127	0.410	0.428	0.649

Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, diolah (2026).

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka, peningkatan investasi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan pengangguran pada seluruh kabupaten/kota. Kabupaten Bekasi, misalnya, meskipun memiliki realisasi investasi yang sangat tinggi, masih mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,78% pada tahun 2025. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Karawang yang memiliki investasi

tinggi, tetapi Tingkat Pengangguran Terbukanya masih mencapai 7,99%. Di sisi lain, Kabupaten Pangandaran yang memiliki nilai investasi relatif lebih rendah justru mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1,91%, yang merupakan salah satu yang terendah di Provinsi Jawa Barat.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tingginya investasi belum tentu secara otomatis mampu menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka. Kondisi ini mengindikasikan bahwa manfaat investasi terhadap penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti karakteristik sektor usaha yang menerima investasi, tingkat penggunaan teknologi, kualitas sumber daya manusia, serta kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Dengan kata lain, investasi yang lebih banyak mengalir pada sektor padat modal (*capital intensive*) cenderung menghasilkan peningkatan output yang lebih besar dibandingkan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, hubungan antara investasi dan Tingkat Pengangguran Terbuka di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat masih perlu dibuktikan secara empiris melalui analisis data panel selama periode 2021–2025.

Selain investasi, faktor makroekonomi lain yang diduga memengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka adalah inflasi. Inflasi merupakan suatu kondisi yang menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berlangsung secara terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Tingkat inflasi yang stabil umumnya mencerminkan kondisi perekonomian yang sehat karena menunjukkan adanya peningkatan aktivitas konsumsi dan produksi. Sebaliknya, inflasi yang terlalu tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat, meningkatkan biaya produksi perusahaan, mengurangi keuntungan dunia usaha, serta memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan ekspansi usaha maupun perekrutan tenaga kerja. Oleh karena itu, stabilitas inflasi menjadi salah satu prasyarat penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Menurut N. Gregory Mankiw, inflasi yang tinggi menimbulkan ketidakpastian dalam kegiatan ekonomi sehingga dapat mengurangi efisiensi produksi, menurunkan investasi, serta memengaruhi permintaan tenaga kerja.

Dengan demikian, pengendalian inflasi merupakan salah satu kebijakan makroekonomi yang penting untuk menjaga stabilitas perekonomian dan mendukung terciptanya kesempatan kerja.[3]

Setelah pandemi Covid-19, Provinsi Jawa Barat menghadapi tekanan inflasi yang cukup tinggi, terutama pada tahun 2022 akibat kenaikan harga energi, gangguan rantai pasok, dan meningkatnya permintaan masyarakat seiring pemulihan aktivitas ekonomi. Namun demikian, melalui kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan oleh pemerintah bersama Bank Indonesia dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), laju inflasi mulai kembali terkendali pada tahun-tahun berikutnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas harga di Provinsi Jawa Barat secara bertahap mengalami perbaikan sehingga diharapkan mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Tabel 1. 4
Perkembangan Inflasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2021–2025

No.	Tahun	Inflasi Jawa Barat (%)
1.	2021	1,47
2.	2022	5,04
3.	2023	2,15
4.	2024	1,64
5.	2025	2,37

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

. Berdasarkan Tabel 1.4, perkembangan inflasi selama periode 2021–2025 menunjukkan pola yang berfluktuasi. Inflasi meningkat pada tahun 2022 hingga mencapai 5,04%, kemudian mengalami penurunan menjadi 2,15% pada tahun 2023, kembali menurun menjadi 1,64% pada tahun 2024, dan meningkat menjadi 2,37% pada tahun 2025. Pola tersebut menunjukkan bahwa setelah mengalami tekanan inflasi yang cukup tinggi pada tahun 2022, kondisi harga di Provinsi Jawa Barat secara umum mulai kembali stabil pada tahun-tahun berikutnya.

Apabila dibandingkan dengan perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka, kondisi tersebut menunjukkan fenomena yang menarik. Secara teoritis,

[3]N. Gregory Mankiw, *Macroeconomics*, 11th ed. (New York: Worth Publishers, 2022), hlm. 95–101.

hubungan antara inflasi dan pengangguran sering dijelaskan melalui Kurva Phillips, yang menyatakan bahwa dalam jangka pendek terdapat hubungan negatif antara inflasi dan tingkat pengangguran. Akan tetapi, berdasarkan kondisi yang terjadi di Provinsi Jawa Barat selama periode penelitian, penurunan inflasi tidak selalu diikuti oleh penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka secara merata pada seluruh kabupaten/kota. Beberapa daerah masih memiliki tingkat pengangguran yang relatif tinggi meskipun tekanan inflasi telah menurun.

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antara inflasi dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat tidak dapat dijelaskan hanya melalui teori Kurva Phillips. Pengaruh inflasi terhadap pengangguran kemungkinan dipengaruhi pula oleh faktor lain, seperti struktur perekonomian daerah, tingkat investasi, kemampuan dunia usaha dalam menyerap tenaga kerja, serta karakteristik sektor ekonomi yang dominan pada masing-masing kabupaten/kota. Oleh karena itu, diperlukan analisis empiris untuk mengetahui apakah inflasi benar-benar berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2021–2025.

Selain investasi dan inflasi, pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makroekonomi yang sangat penting dalam menjelaskan kondisi pasar tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah dalam periode tertentu. Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan meningkatnya aktivitas produksi, konsumsi, investasi, dan perdagangan sehingga mendorong peningkatan permintaan tenaga kerja. Dengan demikian, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, semakin besar peluang terciptanya lapangan kerja baru dan semakin kecil kemungkinan terjadinya pengangguran.

Menurut Sadono Sukirno, pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan ekonomi yang menyebabkan peningkatan produksi barang dan jasa sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun demikian, manfaat pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan pengangguran

sangat bergantung pada kemampuan pertumbuhan tersebut dalam menciptakan kesempatan kerja yang produktif.[4]

Table 1.5
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021–2025

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kabupaten Bandung	2.46	4.35	4.01	4.15	5.47
2.	Kabupaten Bandung Barat	1.93	3.85	3.56	3.57	3.98
3.	Kabupaten Bekasi	2.06	3.81	3.9	4.0	4.15
4.	Kabupaten Bogor	2.19	3.88	3.87	4.18	4.51
5.	Kabupaten Ciamis	3.05	4.31	4.3	4.33	4.78
6.	Kabupaten Cianjur	2.23	3.83	4.0	4.05	4.72
7.	Kabupaten Cirebon	0.91	2.75	3.56	4.61	5.1
8.	Kabupaten Garut	2.33	3.68	3.58	3.67	4.73
9.	Kabupaten Indramayu	0.56	1.69	8.55	1.13	2.1
10.	Kabupaten Karawang	4.41	5.0	4.15	3.04	3.97
11.	Kabupaten Kuningan	2.57	4.37	4.13	4.55	5.97
12.	Kabupaten Majalengka	3.74	5.58	5.15	5.44	5.98
13.	Kabupaten Pangandaran	2.99	4.29	4.56	4.48	5.07
14.	Kabupaten Purwakarta	1.92	3.77	3.56	3.32	4.01
15.	Kabupaten Subang	0.4	3.34	3.74	3.97	4.23
16.	Kabupaten Sukabumi	2.57	4.06	4.15	4.2	4.8
17.	Kabupaten Sumedang	2.28	4.17	4.17	3.27	4.74
18.	Kabupaten Tasikmalaya	2.55	3.85	3.88	3.88	4.6
19.	Kota Bandung	3.02	4.44	4.13	4.1	4.44
20	Kota Banjar	2.49	3.06	3.52	4.32	4.06
21.	Kota Bekasi	2.07	3.75	4.26	4.52	5.22
22.	Kota Bogor	2.79	4.66	4.13	4.41	4.92
23.	Kota Cimahi	3.0	4.43	3.74	3.87	3.99
24.	Kota Cirebon	2.03	4.13	4.08	4.14	4.53
25.	Kota Depok	2.14	3.62	3.5	4.58	5.29
26.	Kota Sukabumi	2.24	3.79	3.6	3.65	3.91
27.	Kota Tasikmalaya	2.31	3.66	4.64	3.96	4.19

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, diolah (2026).

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, terutama melalui sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan jasa. Setelah mengalami perlambatan

[4]Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar*, Edisi Ketiga (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 9–11.

akibat pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat mulai menunjukkan pemulihan pada periode 2021–2025. Peningkatan aktivitas industri, perdagangan, konsumsi rumah tangga, serta investasi menjadi faktor utama yang mendorong membaiknya pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan Tabel 1.5, laju pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat menunjukkan tren pemulihan selama periode penelitian. Sebagian besar daerah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi setelah tahun 2021. Kabupaten Bandung meningkat dari 2,46% menjadi 5,47%, Kabupaten Cirebon dari 0,91% menjadi 5,10%, dan Kota Bekasi dari 2,07% menjadi 5,22% pada tahun 2025.

Meskipun demikian, peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka. Kabupaten Bekasi dan Kota Cimahi, misalnya, masih memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka yang relatif tinggi meskipun pertumbuhan ekonominya mengalami peningkatan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya bersifat pro-employment, melainkan cenderung mengarah pada jobless growth, yaitu kondisi ketika peningkatan output ekonomi tidak diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja secara proporsional. Oleh karena itu, diperlukan penelitian empiris untuk menguji apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah investasi berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2021–2025.
2. Apakah inflasi berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2021–2025.
3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2021–2025.

4. Apakah Upah Minimum berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2021–2025.
5. Apakah investasi, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan Upah Minimum secara simultan berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2021–2025.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), investasi, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan Upah Minimum pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2021–2025. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menguji pengaruh investasi, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka melalui pendekatan kuantitatif menggunakan analisis regresi data panel. Secara lebih rinci, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh investasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2021–2025.
2. Mengetahui pengaruh inflasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2021–2025.
3. Mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2021–2025.
4. Mengetahui pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2021–2025.
5. Mengetahui pengaruh investasi, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan Upah Minimum secara simultan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2021–2025.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi salah satu referensi dalam

penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

   Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam bidang Ekonomi Pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan analisis faktor-faktor yang memengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Melalui penggunaan analisis data panel pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2021–2025, penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai hubungan antara investasi, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan Upah Minimum terhadap TPT. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya, terutama yang mengkaji isu ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi dengan pendekatan kuantitatif.

   Selain memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian Ekonomi Islam melalui interpretasi hasil penelitian berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara pembangunan ekonomi, kesempatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka nilai-nilai Islam.

2. Manfaat Praktis

   Bagi pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang mendukung peningkatan kesempatan kerja melalui penguatan investasi, pengendalian inflasi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan Upah Minimum yang selaras dengan kondisi perekonomian daerah.

   Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi serta referensi empiris mengenai dinamika Tingkat

Pengangguran Terbuka dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Sementara itu, bagi pemangku kepentingan lainnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi ketenagakerjaan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi daerah.

Secara lebih luas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keadilan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan, dan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu rujukan ilmiah yang mengintegrasikan bukti empiris dengan nilai-nilai ekonomi Islam dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Erna A. R. Puspadjuita (2018) bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia menggunakan data antarprovinsi dengan metode regresi linier berganda (*Ordinary Least Squares*/OLS).[5] Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi angkatan kerja berpendidikan SMA ke atas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, sedangkan tingkat industrialisasi, elastisitas penyerapan tenaga kerja, dan upah minimum provinsi berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan karena sama-sama mengkaji pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Risdia Intan Fajarisa, Agus Sumanto, dan Inayati Nuraini Dwiputri (2022) bertujuan menganalisis hubungan antara Tingkat Pengangguran Terbuka, tingkat kesempatan kerja, rasio

[5] Erna A. R. Puspadjuita, "Factors that Influence the Rate of Unemployment in Indonesia," *International Journal of Economics and Finance* 10, no. 1 (2018): 143–147.

ketergantungan (*dependency ratio*), dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebelum dan selama pandemi COVID-19 menggunakan data *time series* periode 1987–2021 dengan pendekatan *Vector Error Correction Model* (VECM).[6] Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesempatan kerja berkontribusi terhadap penurunan rasio ketergantungan, sedangkan peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka meningkatkan rasio ketergantungan penduduk. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan karena sama-sama mengkaji hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Teddy Ch. Leasiwal, Hermi Oppier, Ali Tutupoho, dan Adellci Palloma (2022) bertujuan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, Upah Minimum, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat pengangguran di Indonesia menggunakan data *time series* periode 2001–2020 dengan pendekatan *Vector Error Correction Model* (VECM).[7] Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, sedangkan Upah Minimum dan IPM berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan karena sama-sama menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan Upah Minimum terhadap tingkat pengangguran.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Anggi Tri Wulandari dan Sishadiyati (2023) bertujuan menganalisis pengaruh *Foreign Direct Investment* (FDI), tingkat kesempatan kerja, dan jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran terdidik di Indonesia menggunakan data *time series* periode 1993–2022

[6] Risdia Intan Fajarisa, Agus Sumanto, dan Inayati Nuraini Dwiputri, "Relationship between Open Unemployment Rate, Employment Opportunity Rate, Dependency Ratio and Economic Growth in Indonesia," *International Journal of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)* 2, no. 3 (2022): 696–701.
[7] Teddy Ch. Leasiwal, Hermi Oppier, Ali Tutupoho, dan Adellci Palloma, "Examining the Effects of Economic Growth on Unemployment in Indonesia," *Journal of Social Science* 3, no. 5 (2022): 972–984.

dengan metode regresi linier berganda (*Ordinary Least Squares*/OLS).[8] Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesempatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik. Sementara itu, *Foreign Direct Investment* (FDI) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik di Indonesia. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan karena sama-sama mengkaji pengaruh investasi terhadap tingkat pengangguran.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhayati, dkk. (2024) bertujuan menganalisis hubungan antara ekspor, impor, investasi asing (*foreign investment*), dan pengangguran di Indonesia selama periode 1985–2020 menggunakan data *time series* dengan pendekatan *Vector Autoregression* (VAR).[9] Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspor, impor, dan investasi asing tidak berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja sehingga belum mampu menurunkan tingkat pengangguran secara langsung. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan karena sama-sama mengkaji hubungan investasi dengan tingkat pengangguran.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Muryani, M. A. Esquivias, dan rekan-rekan (2021) bertujuan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*), investasi dalam negeri, dan tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan di 34 provinsi di Indonesia menggunakan data panel periode 2011–2019.[10] Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan investasi dalam negeri

[8] Anggi Tri Wulandari dan Sishadiyati, "The Effect of Foreign Investment, Employment Rates, and Total Population on Educated Unemployment in Indonesia," *International Journal of Economics* 2, no. 2 (2023): 682–685.
[9] Siti Nurhayati dkk., "The Correlation of Export, Import, Foreign Investment, and Unemployment in Indonesia 1985–2020," *JBPE: Journal of Business and Political Economy* 6, no. 2 (2024): 138–146.
[10] Muryani, M. A. Esquivias, dkk., "Dynamics of Income Inequality, Investment, and Unemployment in Indonesia," *Journal of Asian Finance, Economics and Business* 8, no. 7 (2021): 665–675.

berpengaruh negatif dan signifikan. Selain itu, tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan karena sama-sama mengkaji peran investasi dan pertumbuhan ekonomi dalam dinamika ketenagakerjaan.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus dan Widyasastrena (2016) bertujuan menganalisis pertumbuhan minat dan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) serta Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Jawa Barat berdasarkan lokasi kabupaten/kota dan sektor usaha menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.[11] Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat dan realisasi investasi PMA maupun PMDN di Provinsi Jawa Barat mengalami pertumbuhan yang tinggi serta mampu mendorong penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan karena sama-sama mengkaji investasi sebagai salah satu faktor yang berkaitan dengan kondisi ketenagakerjaan.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Harry Aginta (2023) bertujuan memperoleh bukti empiris mengenai keberlakuan kurva Phillips di Indonesia menggunakan data panel 34 provinsi periode 2012–2019 dengan pendekatan ekonometrika data panel.[12] Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurva Phillips berlaku di Indonesia, di mana *output gap* berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan karena sama-sama mengkaji inflasi menggunakan data panel pada tingkat regional.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Gatot Sasongko, Andrian Dolfriandra Huruta, dan Yudith Natalia Vebryanska Gultom (2019) bertujuan menganalisis hubungan antara tingkat inflasi dan Tingkat Pengangguran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

[11] Dony Waluya Firdaus & Dimas Widyasastrena, *Kajian Pertumbuhan Minat dan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Jawa Barat (Lokasi dan Sektor Usaha)*, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 898–910.

[12] Harry Aginta, "Revisiting the Phillips Curve for Indonesia: What Can We Learn from Regional Data?," Research in Economics 77, no. 2 (2023): 1–18.

Terbuka di Indonesia menggunakan data panel 33 provinsi periode 2013–2017 dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Panel Granger Causality Test*.[13] Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan karena sama-sama mengkaji pengaruh inflasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Maulana Putra dan Gerry Ganika (2022) bertujuan menganalisis hubungan antara inflasi dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia selama periode 1986–2018 menggunakan data *time series* dengan pendekatan *Granger Causality Test* dan regresi linier sederhana.[14] Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan hasil regresi linier, meskipun tidak ditemukan hubungan kausal berdasarkan uji *Granger Causality*. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan karena sama-sama mengkaji pengaruh inflasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.
11. Penelitian yang diterbitkan oleh *Asian Development Bank* (ADB) (2016) bertujuan menganalisis perkembangan, tantangan, dan karakteristik pasar kerja di Indonesia menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif berdasarkan data ketenagakerjaan nasional.[15] Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, ditandai dengan tingginya segmentasi pasar kerja, dominasi pekerja informal, rendahnya produktivitas tenaga kerja, serta pertumbuhan upah minimum yang berpotensi mengurangi

[13] Gatot Sasongko, Andrian Dolfriandra Huruta, dan Yudith Natalia Vebryanska Gultom, "The Causality between Inflation and Unemployment: The Indonesian Evidence," *Entrepreneurship and Sustainability Issues* 6, no. 3 (2019): 1433–1440.
[14] Rizky Maulana Putra dan Gerry Ganika, "Causal Relationship between Inflation and Unemployment in Indonesia 1986–2018: A Phillips Curve Analysis," *Tirtayasa Ekonomika* 17, no. 1 (2022): 45–52.
[15] sian Development Bank, *Analysis of Trends and Challenges in the Indonesian Labor Market*, ADB Papers on Indonesia No. 16 (Jakarta: Asian Development Bank, 2016), hlm. 3–30.

permintaan tenaga kerja berkeahlian rendah. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan karena sama-sama membahas keterkaitan pertumbuhan ekonomi, Upah Minimum, dan kondisi pasar kerja terhadap tingkat pengangguran.

12. Penelitian yang dilakukan oleh Aminuddin Anwar (2025) bertujuan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat pengangguran di Indonesia menggunakan data *time series* dengan pendekatan *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL).[16] Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka panjang inflasi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan investasi berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan karena sama-sama mengkaji pengaruh investasi, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran.
13. Penelitian yang dilakukan oleh Jihad Lukis Panjawa dan Sugiharti Mulya Daryono (2020) bertujuan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan Upah Minimum Provinsi terhadap tingkat pengangguran di Indonesia menggunakan data panel 33 provinsi periode 2010–2016 dengan metode regresi data panel.[17] Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, sedangkan Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan karena sama-sama mengkaji pengaruh pertumbuhan ekonomi dan Upah Minimum terhadap tingkat pengangguran.
14. Penelitian yang dilakukan oleh Adi Saputra Pratomo (2011) bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Upah Minimum di Indonesia

SUNAN GUNUNG DJATI

[16] Aminuddin Anwar, "*Economic Growth and Unemployment in Indonesia: The Role of Investment, Inflation, and Government Expenditure*," *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan* 4, no. 2 (2025): 280–289.
[17] Jihad Lukis Panjawa dan Sugiharti Mulya Daryono, "The Effect of Economic Growth and Provincial Minimum Wage on Unemployment Rate in Indonesia," hlm. 10136–10140.

berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggunakan pendekatan yuridis normatif.[18] Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Upah Minimum harus didasarkan pada kebutuhan hidup layak, disertai transparansi dalam penetapan upah, kejelasan perlindungan bagi pekerja, serta penegakan hukum yang konsisten. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan karena sama-sama membahas kebijakan Upah Minimum sebagai salah satu faktor yang berkaitan dengan kondisi ketenagakerjaan.

15. Penelitian yang dilakukan oleh A. Hasyim Asyari Amir Husni, A.M. Rusli, Suhardiman Syamsu, dan Muhammad Chaeroel Ansar (2023) bertujuan menganalisis pengaruh Upah Minimum terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia menggunakan data panel 34 provinsi periode 2014–2022 dengan pendekatan regresi linier.[19] Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upah Minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan karena sama-sama menempatkan Upah Minimum sebagai salah satu variabel utama dalam analisis ketenagakerjaan.
16. Penelitian yang dilakukan oleh Aditya Ramadan, Ageng Teguh, Antonia Roselina, Luthfia Andriastuti, dan Ernoiz Antriyandarti (2024) bertujuan menganalisis pengaruh upah minimum regional, produk domestik bruto (PDB), dan inflasi terhadap tingkat pengangguran di Indonesia menggunakan data *time series* periode 2012–2020 dengan pendekatan regresi linier berganda (*Ordinary Least Squares*/OLS).[20] Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDB dan upah minimum regional berpengaruh negatif

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[18] Adi Saputra Pratomo, "Kebijakan Upah Minimum untuk Perekonomian yang Berkeadilan: Tinjauan UUD 1945," *Journal of Indonesian Applied Economics* 5, no. 2 (2011): 269–283.
[19] A. Hasyim Asyari Amir Husni, A.M. Rusli, Suhardiman Syamsu, dan Muhammad Chaeroel Ansar, "Pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia," *Jurnal Administrasi Negara* 29, no. 3 (2023): 286–295.
[20] Aditya Ramadan, Ageng Teguh, Antonia Roselina, Luthfia Andriastuti, dan Ernoiz Antriyandarti, "The Influence of Regional Minimum Wages on Unemployment Rates in Indonesia: Multiple Linear Regression Analysis," *Economic Military and Geographically Business Review* 2, no. 1 (2024): 1–12.

dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, sedangkan inflasi berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan karena sama-sama mengkaji pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan Upah Minimum terhadap tingkat pengangguran.

17. Penelitian yang dilakukan oleh Sarah Nurzakiah dan Nurfahmiyati (2025) bertujuan menganalisis pengaruh derajat desentralisasi fiskal (DDF), tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dan Upah Minimum terhadap ketimpangan pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2019–2023 menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel.[21] Hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal (DDF) dan Upah Minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) berpengaruh negatif dan signifikan. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan karena sama-sama mengkaji pengaruh Upah Minimum menggunakan analisis data panel pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.
18. Penelitian yang dilakukan oleh Rizal Syaifudin (2022) bertujuan menganalisis tingkat ketimpangan pembangunan serta mengklasifikasikan kondisi pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat menggunakan pendekatan Indeks Williamson dan Tipologi Klassen.[22] Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tergolong tinggi dan sebagian besar daerah berada pada kategori berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang belum diikuti pemerataan pendapatan. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan karena sama-sama menggunakan kabupaten/kota

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[21] Sarah Nurzakiah dan Nurfahmiyati, "Pengaruh DDF, TPAK, dan Upah Minimum terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2019–2023," *Bandung Conference Series: Economics Studies*, Vol. 5, No. 2, 2025, hlm. 157–166.
[22] Rizal Syaifudin, "Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Klasifikasi Pembangunan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat," *Journal of Business and Economics Research (JBE)* 3, no. 2 (2022): 117–124.

di Provinsi Jawa Barat sebagai objek penelitian serta menyoroti pentingnya pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan daerah.

19. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Zulfan Tadjoeddin, Anis Chowdhury, dan Satish Chand (2001) bertujuan menganalisis hubungan antara ketimpangan pembangunan antarwilayah dengan konflik vertikal di Indonesia menggunakan pendekatan kuantitatif melalui analisis ketimpangan regional.[23] Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan yang tinggi berkontribusi terhadap meningkatnya konflik vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, terutama pada wilayah yang kaya sumber daya alam. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan karena sama-sama membahas dinamika pembangunan ekonomi di tingkat daerah.
20. Penelitian yang dilakukan oleh A.T. Nugraha dan G. Prayitno (2021) bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pembangunan antara *Western Indonesia Region* (WIR) dan *Eastern Indonesia Region* (EIR) menggunakan data panel tingkat provinsi dengan pendekatan regresi data panel.[24] Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*/FDI) berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan pembangunan, meskipun faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan berbeda pada masing-masing kawasan. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan karena sama-sama mengkaji peran investasi dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian mengenai pengaruh investasi, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menguji sebagian variabel atau dilakukan pada wilayah dan periode yang berbeda. Kondisi tersebut menunjukkan masih

[23] Mohammad Zulfan Tadjoeddin, Anis Chowdhury, dan Satish Chand, "Regional Disparity and Vertical Conflict in Indonesia," *Journal of the Asia Pacific Economy* 6, no. 3 (2001): 283–301.
[24] A.T. Nugraha dan G. Prayitno, "Regional Disparity in Western and Eastern Indonesia," *Entrepreneurship and Sustainability Issues* 9, no. 1 (2021): 104–109.

adanya ruang penelitian (*research gap*) untuk mengkaji kembali hubungan antarvariabel dengan menggunakan data panel Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2021–2025, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka.

Penelitian ini juga memiliki kebaruan (*novelty*) dibandingkan penelitian sebelumnya, yaitu penggunaan data panel seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2021–2025 dengan mengintegrasikan empat variabel makroekonomi, yaitu investasi, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum dalam satu model analisis. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai determinan Tingkat Pengangguran Terbuka pada tingkat daerah.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan landasan konseptual yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel penelitian berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan keterkaitan investasi, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2021–2025.

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. TPT menunjukkan persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja dan dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi penyerapan tenaga kerja di suatu wilayah. Perubahan TPT dapat berkaitan dengan berbagai faktor ekonomi, antara lain perkembangan investasi, perubahan tingkat harga, pertumbuhan kegiatan ekonomi, dan kebijakan pengupahan. Oleh karena itu, investasi, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum ditetapkan sebagai variabel independen yang dianalisis untuk menjelaskan variasi TPT pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Investasi secara teoretis dapat memengaruhi TPT melalui pembentukan modal, perluasan kapasitas produksi, dan perkembangan kegiatan usaha. Peningkatan investasi berpotensi menciptakan lapangan kerja apabila investasi

tersebut mendorong pendirian usaha baru, perluasan usaha, atau peningkatan produksi yang membutuhkan tambahan tenaga kerja. Namun, investasi tidak selalu menghasilkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang sama karena dampaknya bergantung pada sektor ekonomi penerima investasi, penggunaan teknologi, dan karakteristik kegiatan produksi. Dengan demikian, pengaruh investasi terhadap TPT perlu dianalisis secara empiris untuk mengetahui hubungan yang terjadi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode penelitian.

Inflasi merupakan variabel makroekonomi yang menggambarkan kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan. Perubahan inflasi dapat memengaruhi daya beli masyarakat, biaya produksi perusahaan, serta keputusan konsumsi dan investasi. Apabila kenaikan harga meningkatkan biaya usaha dan menekan permintaan, perusahaan dapat melakukan penyesuaian produksi maupun perekrutan tenaga kerja. Sebaliknya, dalam kondisi tertentu, inflasi dapat terjadi bersamaan dengan peningkatan permintaan dan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, hubungan inflasi dengan TPT tidak selalu menunjukkan arah yang sama pada setiap kondisi perekonomian. Pengaruh inflasi terhadap TPT dalam penelitian ini perlu ditentukan berdasarkan hasil pengujian data kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perluasan kegiatan usaha berpotensi meningkatkan permintaan tenaga kerja dan memperbesar kesempatan kerja bagi masyarakat. Meskipun demikian, peningkatan output tidak selalu diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja secara proporsional. Pertumbuhan ekonomi yang lebih banyak ditopang oleh sektor padat modal atau penggunaan teknologi yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja dapat menghasilkan pertumbuhan kesempatan kerja yang relatif terbatas. Kondisi ketika pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh peningkatan kesempatan kerja yang memadai dikenal sebagai *jobless growth*. Konsep tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan

kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara pertumbuhan output dan penyerapan tenaga kerja, bukan sebagai variabel independen tambahan. Dengan demikian, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap TPT tetap dianalisis melalui variabel pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan dalam penelitian.

Upah minimum merupakan kebijakan pengupahan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja melalui penetapan batas upah minimum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perubahan upah minimum dapat memengaruhi daya beli dan pendapatan pekerja, serta biaya tenaga kerja yang harus ditanggung perusahaan. Peningkatan upah minimum berpotensi mendorong konsumsi rumah tangga, tetapi juga dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam merekrut tenaga kerja, terutama apabila kenaikan biaya tenaga kerja tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Sebaliknya, pengaruhnya terhadap kesempatan kerja dapat berbeda apabila perusahaan memiliki kapasitas usaha dan produktivitas yang memadai. Oleh sebab itu, hubungan upah minimum dengan TPT perlu dianalisis dengan mempertimbangkan karakteristik perekonomian dan kondisi pasar tenaga kerja di wilayah penelitian.

Keempat variabel independen tersebut juga perlu dianalisis secara bersama-sama karena kondisi ketenagakerjaan tidak hanya berkaitan dengan satu faktor ekonomi. Investasi dapat berhubungan dengan perluasan kegiatan usaha, inflasi dapat memengaruhi daya beli dan biaya produksi, pertumbuhan ekonomi menggambarkan perkembangan output wilayah, sedangkan upah minimum berkaitan dengan kebijakan pengupahan dan biaya tenaga kerja. Interaksi kondisi tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai variasi TPT di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menguji pengaruh masing-masing variabel secara parsial, tetapi juga menguji pengaruh investasi, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum secara simultan terhadap TPT.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menempatkan investasi sebagai variabel independen pertama (X_1), inflasi sebagai variabel independen kedua (X_2), pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen ketiga (X_3), dan

upah minimum sebagai variabel independen keempat (X_4). Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka ditetapkan sebagai variabel dependen (Y). Seluruh variabel tersebut dianalisis pada 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2021–2025 dengan menggunakan regresi data panel. Pemilihan model estimasi dilakukan berdasarkan prosedur pengujian model yang dijelaskan dalam metode penelitian.

Dengan demikian, kerangka pemikiran ini menjadi dasar untuk merumuskan hipotesis dan melakukan pengujian empiris terhadap pengaruh investasi, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum terhadap TPT, baik secara parsial maupun simultan. Arah dan signifikansi pengaruh masing-masing variabel tidak ditetapkan sebagai kesimpulan awal, tetapi ditentukan berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu yang relevan, serta hasil estimasi dan pengujian statistik.

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang disusun berdasarkan landasan teori, kerangka pemikiran, dan hasil penelitian terdahulu. Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan untuk menguji pengaruh investasi, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2021–2025. Pengujian hipotesis dilakukan secara parsial untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dan secara simultan untuk mengetahui pengaruh keempat variabel independen secara bersama-sama terhadap TPT. Selanjutnya, hipotesis tersebut diuji secara empiris menggunakan analisis regresi data panel. Adapun hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

1. **H_1:** Investasi berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2021–2025.
2. **H_2:** Inflasi berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2021–2025.

3. **H_3:** Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2021–2025.
4. **H_4:** Upah minimum berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2021–2025.
5. **H_5:** Investasi, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2021–2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG